



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 33 TAHUN 2023**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2024**

**Payakumbuh, 14 Desember 2023**



BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 15).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.**



## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

## Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. menjabarkan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan Program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2024.

## Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024;
- b. menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2024.

## Pasal 4

(1) Renja PD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. bab I memuat pendahuluan;
- b. bab II memuat hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. bab III memuat tujuan, sasaran, Program dan kegiatan;
- d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan PD; dan
- e. bab V memuat penutup.

(2) Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan rincian sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Rencana Kerja Inspektorat;
4. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
5. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
9. Rencana Kerja Dinas Sosial;
10. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



13. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
14. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
15. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
17. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
18. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
19. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman;
20. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
21. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
22. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
23. Rencana Kerja Dinas Pangan;
24. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
25. Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
26. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
27. Rencana Kerja Badan Keuangan;
28. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
31. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
32. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
33. Rencana Kerja Kecamatan Guguk;
34. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
35. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
36. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
37. Rencana Kerja Kecamatan Luak;
38. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
39. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
40. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
41. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
42. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

- (3) Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2024 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2024 dan Rencana Strategis PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD dilakukan oleh masing-masing Kepala PD.

Pasal 7

Perubahan Renja PD Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 14 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

HERMAN AZMAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2023 NOMOR 33

salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

  
ERI FORTUNA, SH  
NIP.19660104199303 1 006

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial tahun 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan selesainya Rencana Kerja Perangkat Daerah ini, diharapkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial dapat mempedomani Renja ini sehingga tujuan dan sasaran yang kita harapkan dalam pencapaian program prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk satu tahun kedepan dapat dicapai.

Terakhir kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih membutuhkan perbaikan- perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan Renja ini dimasa yang akan datang, terima kasih.

Payakumbuh, 14 Desember 2023

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS  
SOSIAL  
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
IF. INDRA SURIANI  
NIP. 19670312 199303 2 011



## DAFTAR ISI

### PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 33 TAHUN 2023

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-13
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-16
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-17
<b>BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial .....	II-18
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.....	II-35
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial .....	II-44
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-53
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	II-66
<b>BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-73
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial.....	III-73
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-77
<b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL</b>	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan.....	IV-81
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>V-107</b>
<b>LAMPIRAN : Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 905/333/BUP- LK/XII/ Tahun 2022 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Formasi Jabatan Ex-Officio</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Kalender Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial I-10 Tahun 2023.....	
Tabel II.1	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-19
Tabel II.2	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-39
Tabel II.3	: Data Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-45
Tabel II.4	: SWOT Analisa Internal dan Eksternal .....	II-49
Tabel II.5	: Analisis Strategi dengan Faktor SWOT Matriks SWOT.....	II-50
Tabel II.6	: Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-54
Tabel II.7	: Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-67
Tabel III.1	: Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota .....	III-78
Tabel III.2	: Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintah Bidang Sosial.....	III-79
Tabel IV. 1	: Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.....	IV-81
Tabel IV.2	: Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.....	IV-82

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada RKPD tersebut.

Renja Dinas Sosial Tahun 2024 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Renja Dinas Sosial menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarnya.



Penyusunan Renja Dinas sosial mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan Perangkat Daerah dan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024, Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 16 Ayat 2, adapun tahapan penyusunan Renja Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

I. Persiapan Penyusunan;

Meliputi Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 905/335/BUD-LK/XII/2022 tentang Pembentukan struktur organisasi tim penyusun rencana kerja perangkat daerah tahun 2024 dan perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2023 di lingkungan pemerintah kabupaten lima puluh kota dalam formasi jabatan *ex-officio*. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Pembentukan struktur organisasi tim penyusunan Rencana Kerja ( RENJA) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Orientasi dan penyusunan agenda kerja tim difasilitasi oleh Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota. Tahapan Persiapan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2022.

II. Penyusunan Rancangan Awal;

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Nomor 050/27/SE/Bapelitbang-LK/II/2023 tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (renja pd) tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 diselaraskan dengan rencana pembangunan provinsi dan Nasional dengan

merujuk pada RPJMN 2020-2024 serta rencana kerja perangkat daerah dan kementerian terkait masing-masing, sesuai dengan pasal 126 penyusunan rancangan awal Renja perangkat daerah dilaksanakan dimulai sejak bulan Desember 2022. Sehingga untuk rancangan awal Renja Dinas Sosial Tahun 2023, direncanakan selesai minggu keempat bulan Desember 2022. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan perkiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan evaluasi Renja Tahun lalu dan Tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sehingga rancangan awal Renja ini mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil Perangkat Daerah Tahun lalu.

### III. Forum Perangkat Daerah

Forum perangkat daerah diadakan Rabu tanggal 22 Februari 2023 di Aula Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam acara forum perangkat Daerah dengan mempertimbangkan masukan saran hasil Forum Konsultasi publik RKPD dan usulan musrenbang RKPD di Kecamatan. Dalam Forum perangkat daerah Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan Hasil Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan Hasil Musrenbang RKPD 2024 di Kecamatan.

### IV. Penyusunan Rancangan;

Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Penyempurnaan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam acara forum perangkat Daerah dengan mempertimbangkan masukan saran hasil Forum Konsultasi publik RKPD dan usulan musrenbang RKPD di Kecamatan. Rancangan Renja ini

kemudian disampaikan kepada Kepala Bapelitbang paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun 2023 untuk diverifikasi oleh tim dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan awal RKPD menjadi Rancangan RKPD. Rancangan Renja perangkat daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala perangkat daerah kepada Kepala Bapelitbang.

#### V. Perumusan Rancangan Akhir;

Rancangan akhir renja merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD, sistematika penyajian rancangan akhir Renja sama dengan rancangan awal Renja.

#### VI. Penetapan.

Pada tahapan rancangan akhir Renja Dinas Sosial Tahun 2023 di sampaikan ke Kepala Bapelitbang paling lambat 1 (satu) minggu setelah perkara RKPD ditetapkan untuk diverifikasi oleh tim. Setelah diverifikasi disempurnakan kembali oleh Dinas Sosial Rancangan Akhir Renja diserahkan kembali ke Kepala Bapelitbang untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

Setiap tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terlepas dari tahapan proses penyusunan RKPD Pemerintah Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD setelah penyempurnaan berdasarkan konsultasi publik merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kesesuaian dan keselarasannya dengan rancangan awal RKPD, merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan akhir RKPD dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja diverifikasi



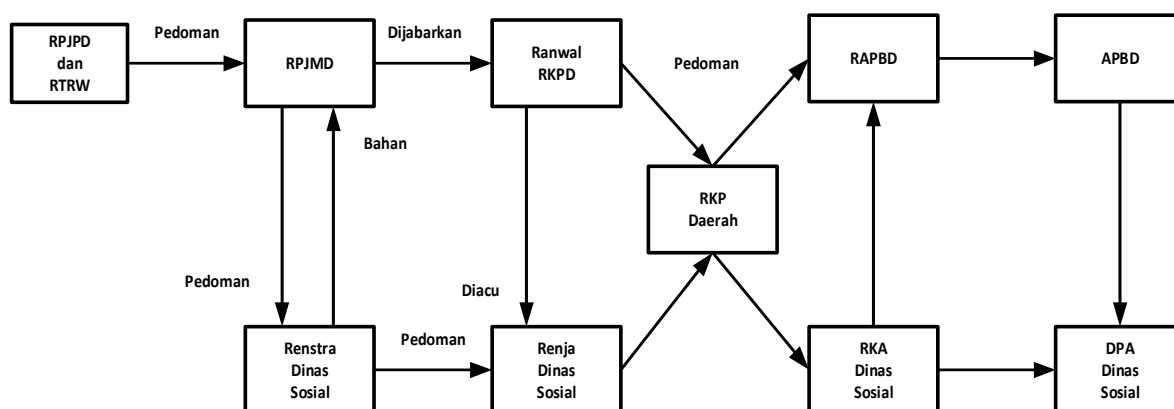
keselarasannya dengan Perkada tentang RKPD oleh Bapelitbang, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Renja OPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra OPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 merupakan kerangka acuan dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan di bidang sosial agar tercapai sinergi yang optimal sehingga pembangunan di bidang sosial yang dilaksanakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Renja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga harus mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah

Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/ Provinsi Sumatera Barat.

#### KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 mengacu pada penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2021 - 2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Dinas Sosial berperan dalam mendukung **Misi ke 1** Bupati Lima Puluh Kota yaitu **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing berlandaskan keimanan**, dan **Misi ke 4** Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu **Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui reformasi Birokrasi Seutuhnya**.

Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman/ acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Berkaitan dengan itu, maka Renja PD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Selanjutnya Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial Tahun 2024 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Tahun 2024, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama

Tahun 2024 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

### **Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja (Renja)**

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selain menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat juga menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

### **Keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) K/L**

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh kementerian sosial RI diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Kementerian Sosial sebagai Pilar Pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pancasila, UU Kesejahteraan Sosial dan Perpres No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara. Peran dan Fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama



5 (Lima) Tahun kedepan yaitu : **“Kementerian Sosial yang Andal, Profesional dan Inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden : ‘ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.’”**

Dalam Penerapan Renstra Kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pengurangan kemiskinan.

#### **Keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Propinsi Sumatera Barat**

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah didasarkan pada penjarangan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan Renja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota

#### **Tidak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD**

UU No.25 tahun 2004 memperlihatkan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran. Penganggaran yang tercermin pada RAPBN/RAPBD tersebut adalah hasil akhir dari dokumen perencanaan sebelumnya yang dikenal dengan Rencana Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D), Rencana Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D), Rencana Kerja Pemerintah Nasional/Daerah (RKPN/RKPD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ini berarti

bahwa perencanaan sangat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pengalokasian anggaran untuk kepentingan masyarakat.

Perencanaan dilihat dari kerangka waktu terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP) yang berdimensi 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) berdimensi 5 tahun dan rencana pembangunan jangka pendek atau perencanaan tahunan yang dalam hal ini rencana kerja pemerintah (RKP). Dilihat dari sisi kelembagaan, perencanaan ada yang bersifat menyeluruh yaitu perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan ada pula perencanaan yang dilakukan oleh sub organisasi pemerintah daerah yang disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni rencana strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah. Sehingga Setelah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun akan menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD.

Tabel 1.1

## Kalender Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
A.	Persiapan Penyusunan Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																																
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																																
3	Orientasi mengenai Renja Dinas Sosial																																
4	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD																																
B.	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																																
2	Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik																																
3	Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil Musrenbang RKPD																																
4	Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil forum Dinas Sosial dan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
C.	Penyusunan Rancangan Renja Dinas Sosial																																
1	Penyusunan Rancangan Renja Dinas Sosial																																
2	Penyampaian Rancangan Renja kepada Bapelitbang untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD																																
3	Verifikasi Renja oleh Bapelitbang untuk menjamin bahwa rancangan renja Dinas Sosial sudah selaras dengan rancangan awal RKPD																																
4	Penyempurnaan Rancangan Renja dengan mempedomani hasil verifikasi																																
D.	Perumusan Rancangan Akhir Renja																																
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan Akhir Renja berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Renja berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan di dalam perkada RKPD																																
E.	Penetapan Renja																																
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja ke Bapelitbang untuk diverifikasi yaitu menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Dinas Sosial selaras dengan peraturan KD tentang RKPD dan Renja PD lainnya																																
2	Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja setelah diverifikasi																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
3	Penyampaian kembali rancangan akhir renja yang telah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi ke Bapelitbang																																
4	Penyampaian rancangan akhir renja semua OPD oleh Bapelitbang kepada KD melalui sekretaris daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Perkada																																
5	Penetapan draf perkada Renja menjadi Perkada Renja OPD se Kabupaten Lima Puluh Kota																																



## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor );

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07 /2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh

Kota Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 123);
26. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 15);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Sosial.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial untuk tahun 2024.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Sosial ini ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Sosial.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial pada tahun 2024.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 ini terdiri dari beberapa BAB sebagai berikut:

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Sosial, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.
- II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Sosial, analisis kinerja pelayan Dinas Sosial, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial, program dan kegiatan tahun 2024.
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Berisikan Rencana kerja dan pendanaan Dinas Sosial Tahun 2024.
- V. Penutup berisikan ketentuan penutup.

Lampiran Keputusan Bupati Nomor 905/333/BUP-LK/XII/2022 tentang pembentukan Stuktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial**

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu (tahun n-2) (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) (tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja Dinas Sosial sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Sosial berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Sosial mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Sosial dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Sosial.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Sosial, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial sampai dengan Tahun 2022 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel II.1.

Tabel II.1 (T-C.29)														
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2022														
Kabupaten Lima Puluh Kota														
SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota														
Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					Urusan Sosial									
06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.01			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum OPD dan RENJA	12 Dokumen	2	1	1	100%	2	5	42%
06	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA	6 Dokumen	1	1	-	0%	1	2	33%
06	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA Perubahan	6 Dokumen	1	1	-	0%	1	2	33%
06	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA	6 Dokumen	1	1	-	0%	1	2	33%
06	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan	6 Dokumen	1	1	-	0%	1	2	33%
06	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJiP, SPIP, LKPJ, EKPPD, LPPD, PK, RKT, Rencana Aksi, Realisasai Rencana Aksi, SPM dan Laporan Capaian Kinerja	72 Dokumen	12	10	12	120%	12	36	50%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat DaerahTahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat DaerahTahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
06	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah OH yang Melaksanakan Evaluasi Kinerja dan Monitoring Kegiatan APBD	516 OH	61	61	61	100%	54	176	34%
06	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Honor PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pejabat Pengadaan dan PPHP	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06	01	2.02	03		Pelaksanaan Penataanusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ dan Jumlah SPJ Kegiatan untuk Verifikasi	72 Dokumen	12	12	-	0%	12	24	33%
06	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6 Dokumen	1	1	1	100%	1	3	50%
06	01	2.02	06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6 Dokumen	0	-	-	0%	0	-	0%
06	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06	01	2.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen	1	1	-	0%	1	2	33%
06	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan RKBMD dan RKPBMMD	12 Dokumen	2	2	-	0%	2	4	33%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat DaerahTahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat DaerahTahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
06	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	12 Dokumen	2	2	-	0%	2	4	33%
06	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	95%	95%	95%	0%	95%	95%	95%
06	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelegkapannya	Jumlah Stel Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya/ Pakaian Khusus Hari Tertentu yang diadakan	420 Stel	70	70	-	0%	0	70	17%
06	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah OH yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54 OH	0	15	-	0%	0	-	0%
06	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.06	01		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listik yang diadakan	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 Bulan	12	-	-	0%	12	24	33%
06	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72 Bulan	0	-	-	0%	0	-	0%
06	01	2.06	04		Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Jumlah Bulan Alat Kebersihan yang diadakan	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06	01	2.06	05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06	01	2.06	06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah Pembayaran Bahan Bacaan dan Surat Kabar	72 Bulan	12	12	0	0%	12	24	33%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
06	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Porsi Makan dan Minum Tamu yang disediakan	5.598 Porsi	12	545	545	100%	1093	1.650	29%
06	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Porsi Makan dan Minum Rapat dan Jumlah OH yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4.532 Porsi dan 870	115	842	842	100%	614	1.571	29%
06	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persetase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.07	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	0	-		0%	0	-	0%
06	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4	3 Unit Kendaraan Roda 4 dan 6 Unit Kendaraan Roda 2	1	3	0	0%	3	3	33%
06	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Lemari Arsip, Kursi Tamu, Kursi Rapat, Meja, Rak Buku/Koran	2	3	0	0%	3	3	50%
06	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Mesin lainnya	Laptop, Notebook, Komputer, Printer, UPS, AC, CCTV, FingerPrint, TV, Kulkas	2	8	-	0%	2	2	3%
06	01	2.07	09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1	-	-	0%	0	-	0%



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
06	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasaarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	0	-	-	0%	0	-	0%
06	01	2.08			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>
06	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Bulan	12	12	0	0%	12	24	33%
06	01	2.08	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 Bulan	0	-	-	0%	12	12	17%
06	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Gaji PTT, THL dan Honor Pengurus barang Pengguna	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06	01	2.09			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	100%	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>
06	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	1	-	-	0%	1	2	33%
06	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeiharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat DaerahTahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat DaerahTahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
06	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata-rata Perbaikan Peralatan Kantor yang dilakukan dalam Satu Tahun	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pekerjaan Rehab Berat Gedung Kantor	6 Paket	1	1	0	0%	1	2	33%
06	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	0	0	0	0%	0	-	0%
06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang di Berdayakan	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	02	2.03			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	02	2.03	01		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dan Pemilihan Pilar-pilar Berprestasi	81 Orang PSM	81	81	-	0%	81	81	100%
06	02	2.03	02		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK dan Pemilihan Pilar-Pilar Berprestasi	13 Orang TKSK	13	13	13	100%	13	13	100%
06	02	2.03	03		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana PPKS, Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat (RLTH) Pengadaan Bangunan Warung Binaan Sosial (Warbinsos), Jumlah Pemberian BantuanUEP Fakir Miskin dan UEP KUBE	150 RLTH, 6 kali Sosialisasi, 300 KPM dan 30 Klpk	135	75	75	100%	68	278	57%
06	02	2.03	04		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna Yang Mengikuti Sosialisasi dan Lomba Karang Taruna dan Jumlah PSKS Kelembagaan Masyarakat yang di berdayakan	80 Karang Taruna, 11 LKS, 1 LKKS , Sosialisasi dan Musda LKKS	92	92	92	100%	92	92	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat DaerahTahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat DaerahTahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
06	02	2.03	05		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Sosial dan Penyerahan Bantuan untuk Masyarakat	6 Sosialisasi, 60 Orang Bantuan	11	11	-	0%	-	11	17%
06	03				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban	25%	0	-	-	0%	0%	0%	0%
06	03	2.01			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban	25%	0	-	-	0%	0%	0%	0%
06	03	2.01	01		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak	Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban	6 orang	0	-	-	0%	0%	0%	0%
06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85%	85%	85%	85%	100%	85%	85%	85%
06	04	2.01			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	85%	85%	85%	85%	100%	85%	85%	85%
06	04	2.01	01		Penyediaan Permakanan	Jumlah Bantuan Permakanan bagi Lansia Terlantar, Lansia Tidak Potensial UEP bagi Lansia	11972 Orang Permakanan Lansia dan 180 Orang UEP Lansia	2.195	1.972	338	17%	18.888	21.421	176%
06	04	2.01	02		Penyediaan Sandang	Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Bayi Terlantar dan Disabilitas Terlantar	596 Orang	0	30	-	0%	75	75	13%
06	04	2.01	03		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Pemberian Alat Bantu Cacat bagi Lansia	528 Orang	90	55	0	0%	75	165	31%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
06	04	2.01	04		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasik Keluarga	360 Kasus ABH/ Anak Terlantar	0	60	60	100%	50	110	31%
06	04	2.01	05		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Pelatihan, Pelayanan dan Bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas, Tersedianya Rumah Idaman UI/LS/Rumah Antara/Rumah Singgah bagi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan	273 Orang, 1 Rumah Singgah	45	87	10	11%	23	78	28%
06	04	2.01	06		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	150 Orang	0	-	-	0%	18	18	4%
06	04	2.01	08		Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pelatihan bagi Anak Terlantar dan Putus Sekolah dan Pengiriman Anak ke Panti Rehabilitasi dan Bimbingan Lanjut untuk Anak terlantar (Putus Sekolah)	480 Orang	0	30	20	67%	32	52	11%
06	04	2.01	10		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	30 Orang	0	0	0	0%	0	-	0%
06	04	2.01	11		Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30 Orang	0	0	0	0%	0	-	0%
06	04	2.01	12		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi Sosial	169 Orang	16	32	15	47%	15	46	27%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat DaerahTahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat DaerahTahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
06	04	2.02			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS danNAPZA di Luar Panti Sosial	85%	85%	85%	85%	100%	85%	85%	85%
06	04	2.02	02		Pemberian Layanan Kedaruratan	JumlahPemberian Layanan Kedaruratan	60 Orang	0	-	-	0%	-	0%	0%
06	04	2.02	03		Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	180 Orang	0	-	-	0%	-	0%	0%
06	04	2.02	04		Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	180 Orang	0	-	-	0%	-	0%	0%
06	04	2.02	05		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	90 Orang	0	-	-	0%	-	0%	0%
06	04	2.02	06		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	60 Orang	0	-	-	0%	-	0%	0%
06	04	2.02	07		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan bantuan UEP dan bimbingan lanjut untuk wanita tuna susila	140 orang	20	15	-	0%	10	30	21%
06	04	2.02	08		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	60 Orang	0	-	-	0%	-	-	0%
06	04	2.02	10		Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, PBI JKSS, PBI Jamkesda dan PBI JKN APBD Serta Sosialisasi	Jamkesda 18.500 Jiwa, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa	0	212.391	-	0%	212.391	212.391	100%



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
06	04	2.02	11		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	60 Orang	0	-	0%	-	-	0%
06	04	2.02	12		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	60 Orang	0	-	0%	-	-	0%
06	04	2.02	13		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pemberian Layanan Rujukan	60 Orang	0	-	0%	-	-	0%
06	04	2.02	14		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Panti di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Jumlah Tenaga Pembina Anak Terlantar yang mengikuti Bimbingan Teknis	9 Panti 150 orang	27	27	0	0%	0	0%
06	05				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>
06	05	2.01			<b>Pemeliharaan Anak Terlantar</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Anak Terlantar</b>	<b>85%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	0%	0%
06	05	2.01	01		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	108 orang	0		0%	0	0%	0%
06	05	2.01	02		Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Rujukan Anak - Anak Terlantar	130 orang	0		0%	0	0%	0%
06	05	2.01	03		Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	156 orang	0		0%	0	0%	0%
06	05	2.02			<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	100%	<b>95%</b>	<b>95%</b>
06	05	2.02	01		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data BDT serta Pendataan PPKS dan PSKS	13 Kecamatan	13	13	100%	13	13	100%
06	05	2.02	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) Sembako	24.994 KPM	22451	24994	0	0%	24.994	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat DaerahTahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat DaerahTahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
06	05	2.02	03		Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Monitoring Penyaluran Bantuan Keluarga Harapan (PKH)	16.898 KPM	0	16898	16898	100%	16.898	16.898	100%
06	05	2.02	04		Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Bantuan UEP untuk WRSE dan KTK	25 KTK 25 WRS, 264 UEP KTK dan WRSE	0	50	13	26%	100	113	31%
06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06	06	2.01			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	06	2.01	01		Penyediaan Makanan	Jumlah Penyediaan Makanan dan Pembangunan Gudang Logistik	858 Paket 1 Gudang Logistik	1	150	126	84%	173	300	35%
06	06	2.01	02		Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang untuk Korban Bencana	900 Paket	0	150	0	0%	0	0	0%
06	06	2.01	03		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsian	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1 Unit	-	-	-	0%	0	0	0%
06	06	2.01	04		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan orang terlanjar dalam perjalanan	72 orang	6	18	6	33%	10	22	31%
06	06	2.01	05		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Penggantian transportasi Tagana dan selter Pengungsi	82 Orang Tagana dan 1 selter Pengungsi	82	30	30	100%	25	82	99%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
06 06 2.02	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>				<b>Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	100%	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>
06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				Jumlah Sosialisasi untuk Kampung Siaga Bencana dan Pembentukan Kampung Siaga Bencana	6 Sosialisasi 1 Kampung Siaga Bencana	0	1	0	0%	0	0	0%
06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dan Perekrutan Tagana Muda	150 orang	25	25	0	0%	25	50	33%
06 07	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>				<b>Persentase Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	100%	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>
06 07 2.01	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>				<b>Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	100%	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>
06 07 2.01 01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				Jumlah Rehab sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan dan Peringatan Hari Pahlawan 10 November	6 Rehab, 6 Kali Peringatan	2	2	1	50%	2	5	42%
06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Makam	1	0	0	0%	0	1	100%
06 07 2.01 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				Jumlah Hari Kerja Tenaga Pengamanan Taman Makam Pahlawan	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%

Realisasi program, kegiatan dan Sub kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : pada tahun 2022 program dan kegiatan telah memenuhi target kinerja dan hasil kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan seperti :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH,

- a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direncanakan target 95 % terealisasi 95 %. Sedangkan Sub Kegiatan yang direncanakan target di renja sebanyak 7 sub kegiatan yang terealisasi sebanyak 3 sub kegiatan ini di karenakan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak mencukupi. Untuk 3 Sub kegiatan tersebut target terealisasi semuanya 100 %.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan direncanakan target 95 % terealisasi 95 %. Sedangkan Sub kegiatan yang ditargetkan dalam renja sebanyak 6 Sub Kegiatan terealisasi sebanyak 3 sub kegiatan dan yang 3 sub kegiatan ini dari target yang di tetapkan terealisasi semuanya 100%.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, direncanakan target 95 % terealisasi 95 % dengan sub kegiatan yang direncanakan dalam renja sebanyak 8 sub kegiatan terealisasi sebanyak 5 sub kegiatan. 3 Sub Kegiatan lagi tidak terakomodir karena kemampuan keuangan daerah tidak memadai. Dari 5 sub kegiatan yang terealisasi dari target yang di tetapkan semuanya terealisasi sesuai target 100%.
- d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan target 95 % terealisasi 95 %.yang terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

## 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan target 95 % terealisasi sebanyak 95 %.

- ❖ Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota keluaran kegiatan jumlah Pemilihan TKSK Berprestasi Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota dan Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK sebanyak 13 orang. Target renja tahun 2022 13 TKSK dan terealisasi sebanyak 13 TKSK (100%)
- ❖ Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana PMKS (RTLH) dan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dan RTLH dengan target sesuai dengan realisasi (100%).
- ❖ Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan keluaran kegiatan jumlah Karang Taruna yang Mengikuti Bimtek sebanyak 80 orang dan Sosialisasi penguatan kelembagaan LKKS sub kegiatan terealisasi 100 % sesuai dengan target.

## 3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan target kegiatan 85 % terealisasi sebanyak 85 %. Kegiatan ini memiliki 10 sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada renja tahun 2022 tapi yang terealisasi sebanyak 5 sub kegiatan karena sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dari 5 Sub kegiatan yang terealisasi semuanya memenuhi target pencapaian (100%).

#### 4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan target kegiatan 85 % terealisasi sebanyak 85 %.
  - ❖ Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data BDT serta Pendataan PPKS/PSKS untuk sebanyak 13 Kecamatan, dengan target 13 kecamatan terealisasi sebanyak 13 kecamatan (100%)
  - ❖ Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan keluaran kegiatan Monitoring Penyaluran Bantuan Keluarga Harapan (PKH) 17.130 Orang KPM, terealisasi 100%.

#### 5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan target target 95 % terealisasi 95 %. Sub kegiatan yang mendukung pencapaian yaitu : Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dengan keluaran Jumlah Penyediaan Makanan untuk korban bencana alam dan sosial dan Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan keluaran kegiatan Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan (Mayat Terlantar) dan Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan (orang Terlantar dalam Perjalanan), dan sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial dengan keluaran kegiatan Jumlah Penggantian Transportasi Tagana dari target yang direncanakan terealisasi 100%.

#### 6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan target 95% terealisasi sebanyak 95 %. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota keluaran kegiatan, Peringatan Hari Pahlawan 10 November 1 kali peringatan. Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan keluaran kegiatan Jumlah Bulan Kerja Tenaga Kontrak (Tenaga

Keamanan Makam Pahlawan) yang Dibayarkan sebanyak 12 bulan. Target terealisasi 100%.

Realisasi program, kegiatan dan Sub kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : pada tahun 2022 program dan kegiatan tidak memenuhi target kinerja dan hasil kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan seperti :

#### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

- a. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD dalam renja terdapat target dari 2 sub kegiatan ini karena kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi jadi sub kegiatan ini tidak terealisasi.
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tidak jadi terealisasi karena tidak cukupnya kemampuan keuangan daerah untuk pemenuhan kegiatan ini.
- c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tidak dapat direalisasikan karena tidak adanya anggaran untuk kegiatan ini.

#### 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota keluaran kegiatan ini Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dan pemilihan pilar- pilar berprestasi sebanyak 81 orang, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi untuk kegiatan ini.

### 3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Sub Kegiatan pada kegiatan ini tidak ada yang dapat direalisasikan sesuai target karena keuangan daerah tidak mencukupi untuk pembiayaan kegiatan ini

### 4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- ❖ Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota keluaran kegiatan Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP)/ Sembako 25.287 KPM, kegiatan monitoring ini tidak dapat terlaksana karena kemampuan keuangan daerah terbatas.
- ❖ Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan keluaran kegiatan Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang (bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Korban Tindak kekerasan (KTK) dengan target di renja 50 orang yang akan mendapatkan pelatihan dan bantuan sosial ternyata teralisasi hanya monitoring penerima bantuan sebanyak 13 kecamatan.

### 5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap siagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan keluaran kegiatan Jumlah Sosialisasi untuk Tagana dan Masyarakat Rawan Bencana tidak dapat terealisasi karena ketidak mampuan keuangan daerah.

Realisasi program, kegiatan dan Sub kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : pada tahun 2022 program dan kegiatan yang melebihi target kinerja dan hasil kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan seperti :



## 1. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Program Penanganan Bencana, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub kegiatan yang mendukung pencapaian melebihi target kinerja yaitu : Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dengan keluaran Jumlah Penyediaan Makanan untuk korban bencana alam dan sosial yang semula target nya 126 Paket terealisasi sebanyak 128 Paket , persenrealisasinya menjadi 102 %.

Faktor- Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Pada program penunjang urusan pemerintah daerah, program perberdayaan dan program rehabilitasi sosial faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada kegiatan tersebut karena anggaran untuk sub kegiatan itu tidak ada. Sehingga target untuk pencapaian kegiatan tidak berjalan semestinya.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial karena tidak tercapainya atau terpenuhinya kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah tidak terpenuhinya target yang ada dalam Renstra Dinas Sosial .

Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut adalah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan- kegiatan yang tidak tercapai atau terpenuhinya target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tersebut.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria) dan SPM , maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. (IKK sama dengan IKD dalam RPJMD Bab VII).

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan (Misalnya : data yang diluar Renstra dan di Luar RPJM tetapi dihasilkan oleh OPD dan terkait dengan Tupoksi OPD)

Jika perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing- masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Dinas Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial :

1. Jenis Pelayanan Dasar , Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, Indikator Pencapaian Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
2. Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, indikator pencapaian Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
3. Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, indikator pencapaian jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
4. Jenis pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, Indikator pencapaian jumlah warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti.
5. Jenis Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota, Indikator Pencapaian Jumlah warga negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, yang disesuaikan dengan format terlihat pada table II.2 berikut ini :

Tabel II.2 (T-C.30)													
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota													
No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKD	IKU KPL OPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	√			25	25	25	25	25	25	25	25	
2	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	√			30	20	25	30	30	20	25	30	
3	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	√			263	275	300	263	263	275	300	263	
4	Jumlah warga Negara /Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	√			0	0	5	5	0	0	18	5	
5	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	√			126	173	180	162	126	173	180	162	
6	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial		√		85,2	86,8	88,2	89,6	86,8	86,8	88,2	89,6	
7	Persentase PMKS yang tertangani		√		93,5	94,5	95,2	96,2	94,5	94,5	95,2	96,2	
8	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		√		93,3	93,6	93,8	94	93,6	93,6	93,8	94	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKD	IKU KPL OPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		√		98	98	98	98	98	98	98	98	
10	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		√		98	98	98	98	98	98	98	98	
11	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		√		63	64	65	66	64	64	65	66	
12	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		√		7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
13	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota		√		100	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			√	72	74	76	78	74	74	76	78	
15	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			√	95	95	95	95	95	95	95	95	
16	Nilai AKIP			√	65	65	65	65	65	65	65	65	
17	Nilai IRB			√	16,5	16,75	17	17,25	16,75	16,75	17	17,25	
18	Nilai IKM			√	85	85	85	85	85	85	85	85	

Analisa Indikator Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota (table 2.II T-C 30) :

Indikator dari nomor 1 sampai 5 adalah indikator pencapaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota indikator SPM terdiri dari :

1. Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Target pencapaian nya 25 orang disabilitas dan teralisasi sebanyak 25 orang, jadi pencapaian 100%.
2. Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Target pencapaian nya 30 orang anak terlantar dan teralisasi sebanyak 30 orang, jadi pencapaian 100%.
3. Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Target pencapaian nya 263 orang lanjut usia dan teralisasi sebanyak 263 orang, jadi pencapaian 100%.
4. Jumlah warga Negara /Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti. Pada indikator ini target nya 0 dan realisasinya 0. Karena indikator ini tidak ada data dukung nya.
5. Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. Target 126 orang terealisasi ebanyak 126 orang, pencapaian 100 %.

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya di singkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak di peroleh setiap warga secara minimal. Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 11 ayat (4) dan pasal 14 ayat (3), serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota, maka pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menuangkan capaian SPM ini ke dalam Dokumen perencanaan dan Alokasi Anggaran untuk percepatan pencapaian SPM.

Indikator dari nomor 6 sampai 13 adalah indikator pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota indikator IKD terdiri dari :

6. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial.
7. Persentase PMKS yang tertangani.
8. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
9. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.
10. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.
11. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.
12. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
13. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota.

Indikator pencapaian Indikator Kinerja Daerah melebihi target yang di tetapkan setiap tahunnya.

indikator kinerja daerah (IKD) adalah memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditunjukkan oleh akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator dari nomor 14 sampai 18 adalah indikator Kinerja Utama Kepala OPD yaitu Dinas Sosial yang mempunyai 3 sasaran dan 5 indikator kinerja. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari :

14. Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan target 72 % terealisasi 74 % realisasi melebihi target yang direncanakan. Analisa terhadap Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seberapa banyak pelayanan kepada PPKS pada tahun n bagi jumlah PPKS pada tahun n. Data naik turun ini berpengaruh kepada anggaran tiap tahun yang dikelola oleh Dinas Sosial. Semakin banyak anggaran semakin banyak PPKS yang terlayani.
15. Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan target 95 % dan realisasi 95 %. Target terealisasi 100%. PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial . Target untuk peran aktif PSKS dalam Penyelenggaraan PSKS adalah tetap karena disini di nilai seberapa banyak PSKS yang berperan aktif dalam penanganan kesejahteraan sosial apada tahun n di bagi dengan jumlah keseluruhan PSKS yang ada pada tahun n.
16. Nilai AKIP, target 65 % terealisasi 65 % pencapaian target 100%.
17. Nilai IRB, target 16, 5 terealisasi 16,75 %. Realisasi melebihi target yang direncanakan.
18. Nilai IKM, dengan target 85 terealisasi 85 %.

Indikator yang di nilai pada Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Sosial yang ke 3 yaitu Nilai AKIP, Nilai IRB dan Nilai IKM Dinas Sosial . Pada pencapaian target ini berdasarkan nilai yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun yang di nilai.

Ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU}. Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.



### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial**

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota khusus Provinsi , Kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023.

Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah khususnya Provinsi. Mengenai koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah Provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan. Secara filosofis, tugas dan fungsi Kementerian Sosial berfokus pada upaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar mereka dapat berdaya dan berfungsi sosial, mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami, serta berperan aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Menyelenggarakan urusan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Visi Kementerian Sosial adalah : “Kementerian Sosial yang andal, professional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden : ‘ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong “. Dalam penerapan Renstra kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan Nawacita yang telah ditetapkan , mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan . Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi kemiskinan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka identifikasi permasalahan dan hambatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah di bidang sosial dengan penyelenggaraan perencanaan yang berorientasi kepada penyelenggaraan pelayanan yang muaranya terhadap kesejahteraan masyarakat. Identifikasi ini difokuskan terhadap permasalahan urusan sosial. Data permasalahan dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.3 Data Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar	Kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana

Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau disebut juga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ada 26 Jenis :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah.
7. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalah Gunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap pencapaian program nasional /internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dengan Visi :

**“ Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah ”** Adapun misi Kepala Daerah yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah Misi ke-1 meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keagamaan, dengan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.

Sasaran :

1. Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya.

Misi ke-4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi seutuhnya, dengan tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan Sasaran :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah : Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor–faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor–faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT).

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial ke depan. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada.

Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-duanya secara bersama-sama.

Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, keterampilan/ kemampuan, atau keuntungan.

Sedangkan **kelemahan** dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan/kemampuan yang secara serius merintangi performansi efektif suatu organisasi. Fasilitas, sumberdaya financial, kapabilitas manajemen, keterampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahan-kelemahan organisasi.

**Peluang**, merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan **acaman** dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

**Tabel II.4**

**SWOT Analisa Internal dan Eksternal**

<b>KEKUATAN (Strengths)</b>		<b>KELEMAHAN (Weaknesses)</b>	
S1	Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	W1	Tenaga sosial yang profesional masih kurang
S2	Motivasi, semangat dan etos kerja aparatur cukup tinggi	W2	Jumlah sumber daya aparatur secara kuantitas belum mencukupi
S3	Fasilitas pendukung kerja cukup memadai	W3	Keterbatasan anggaran
		W4	Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar bidang
		W4	Masih kurangnya tenaga TKSK/PSM yang aktif di nagari dan kecamatan

	<b>PELUANG (Opportunities)</b>		<b>ANCAMAN (Threats)</b>
O1	Dukungan dari sumber-sumber kesejahteraan sosial cukup tinggi	T1	Tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial



➤ Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas PPKS	<p>dalam penanggulangan masalah sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi</li> <li>➤ Meningkatkan kesejahteraan PPKS</li> </ul>	<p>dalam membangun jaringan kerja yang lebih baik dan luas pada ruang lingkup internal dan eksternal (<i>networking</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memanfaatkan tenaga TKSK/PSM yang ada untuk meningkatkan kualitas PPKS</li> </ul>
<b>ANCAMAN (<i>Threats</i>)</b>	<b><u>STRATEGI S + T</u></b>	<b><u>STRATEGI W + T</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</li> <li>➤ Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menurunkan angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</li> <li>➤ Meningkatkan penyuluhan bagi daerah-daerah rawan bencana</li> </ul>	<p>Meningkatkan kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</p>

### 1. Strategi Kekuatan – Peluang ( S – O ) :

- Meningkatkan peran lembaga dalam memanfaatkan sumber-sumber kesejahteraan sosial
- Meningkatkan jaringan kerjasama lembaga pemerintah dan swasta dalam penanggulangan masalah sosial
- Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi
- Meningkatkan kesejahteraan PPKS

### 2. Strategi Kelemahan – Peluang ( W – O ) :

- Meningkatkan profesional aparaturnya dalam peningkatan pembinaan potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial.



- b. Mengelola anggaran yang berdayaguna berhasil-guna serta efektif dan efisien dalam membangun jaringan kerja yang lebih baik dan luas pada ruang lingkup internal dan eksternal (*networking*).
- c. Memanfaatkan tenaga TKSK/PSM yang ada untuk meningkatkan kualitas PPKS

### **3. Strategi Kekuatan – Ancaman ( S – T ) :**

- a. Menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- b. Meningkatkan penyuluhan bagi daerah-daerah rawan bencana

### **4. Strategi Kelemahan-Ancaman ( W – T ) :**

- a. Meningkatkan profesional aparaturnya guna meningkatkan kemandirian PPKS
- b. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam (lahan), melalui investasi yang didukung oleh swasta

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Belum optimalnya bantuan tanggap darurat bencana
3. Belum optimalnya peran PSKS dalam penanganan PPKS
4. Masih terbatasnya ketersediaan data yang *valid* dan *up to date* di berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan;
5. Masih diperlukan nilai-nilai kesetiakawanan sosial
6. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia/aparaturnya di Dinas Sosial

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Sosial dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja Dinas Sosial tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja Dinas Sosial juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Rancangan awal RKPD Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 berdasarkan Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 sebesar Rp. 16.334.407.000,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Rupiah) dan setelah di analisa hasil kebutuhan berdasarkan pagu indikatif OPD untuk RKPD tahun 2024 adalah Rp. 8.278.634.914,- (Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Belah Rupiah) rancangan awal dan analisa kebutuhan sesuai dengan kebutuhan ada kegiatan.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Sosial disajikan dalam Tabel II.6. berikut:

Tabel II.6 (T-C.31.)  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024  
Kabupaten Lima Puluh Kota

SKPD: DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

01	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	6.826.407.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	3.311.163.814	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Sinergitas perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	95%	86.600.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	95%	9.029.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	16.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.734.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	11.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	10.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen DPA yang di susun	1 Dokumen	10.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 Dokumen	10.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos	Jumlah dokumen LKJIP, SPIP, LKPJ, EKPPD, LPPD, Penetapan Kinerja, RKT, Rencana Aksi, Realisasi Rencana Aksi, SPM, PMPRB, SPIP dan Laporan Kinerja	12 Dokumen	19.700.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	4.375.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah OH yang melaksanakan Evaluasi Kinerja dan monitoring Kegiatan APBD	81 OH	8.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1.920.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tertib administrasi keuangan</b>	<b>95%</b>	<b>4.862.980.700</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tertib administrasi keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>2.923.187.814</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan (Honor, PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, PPHP, Pejabat Pengadaan )	12 bulan	4.800.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	2.919.256.814	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen SPJ dan Jumlah SPJ Kegiatan yang di Verifikasi	12 dokumen	42.780.700	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinsos	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	6.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.993.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinsos	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinsos	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	12 bulan	4.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	-	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinsos	Jumlah dokumen laporan pronogsis realisasi anggaran	1 Dokumen	4.500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinsos	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.938.000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase terbit Administrasi Milik Daerah</b>	<b>95%</b>	<b>7.800.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase terbit Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.933.000</b>	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan RKBMD dan RKPBMd	2 Dokumen	3.900.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dinsos	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dinsos	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	3 Dokumen	3.900.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.933.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>95%</b>	<b>44.996.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0%</b>		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinsos	Jumlah Stel Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya/ Pakaian Khusus Hari Tertentu yang diadakan	70 Stel	35.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinsos	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinsos	Jumlah OH yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 OH	9.996.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinsos	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>95%</b>	<b>440.309.300</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum</b>	<b>95%</b>	<b>99.750.000</b>	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Dinsos	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	15.500.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangun Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Bulan	-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinsos	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	12.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinsos	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0 Bulan	-	
	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Dinsos	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor dan jumlah bulan alat kebersihan yang diadakan	12 bulan	42.500.000	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	29.940.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinsos	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	41.809.300	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinsos	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.060.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinsos	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan dan surat kabar	12 bulan	8.500.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinsos	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinsos	Jumlah porsi makan minum tamu yang disediakan	872 Porsi	28.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinsos	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos	Jumlah porsi makan minum rapat dan jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	737 Porsi dan 135 OH	280.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	33.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan</b>	<b>95%</b>	<b>573.450.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>95%</b>	<b>19.000.000</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinsos	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinsos	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinsos	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional (Roda 2)	1 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2	415.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinsos	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Kendaraan Roda 2 (dua)	3 Unit	-	
	Pengadaan Mebel	Dinsos	Jumlah Pengadaan Mobiler	Lemari arsip, kursi tamu, kursi rapat, meja, rak buku/koran	40.000.000	Pengadaan Mebel	Dinsos	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Lemari Arsip	3 Unit	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor dan Mesin Lainnya	2 Unit AC, 2 Unit Kipas Angin, 2 Unit Laptop, 1 Unit Portable Ampli, 2 Unit Printer dan 1 Unit Televisi	118.450.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	19.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	-	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>95%</b>	<b>348.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>95%</b>	<b>57.792.000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinsos	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.042.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinsos	Jumlah pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 Bulan	60.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinsos	umlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	38.750.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	8.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Bulan	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos	Jumlah Bulan Honor Tenaga Kontrak dan Honor Pengurus Barang Pengguna yang dibayarkan	12 Bulan	270.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.000.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik</b>	<b>95%</b>	<b>462.271.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>95%</b>	<b>200.472.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinsos	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	35.271.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinsos	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Dinsos	Jumlah bulan pemeliharaan rutin.berkala kendaraan dinas operasional	12 Bulan	260.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Dinsos	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	192.802.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Rata-rata perbaikan peralatan kantor yang dilakukan dalam satu tahun	12 Bulan	17.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	7.670.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab	1 Paket	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Paket	-	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		<b>Persentase PSKS yang diberdayakan</b>	<b>95%</b>	<b>2.421.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		<b>Persentase PSKS yang diberdayakan</b>	<b>95%</b>	<b>-</b>	
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten</b>	<b>95%</b>	<b>2.421.000.000</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten</b>	<b>95%</b>	<b>-</b>	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dan pemilihan pilar- pilar berprestasi	81 orang PSM	450.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	81 Orang	-	Kegiatan Pindah ke Kegiatan Pendukung PMK 212.
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK dan pemilihan pilar- pilar berprestasi	13 orang TKSK	175.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang	-	Kegiatan Pindah ke Kegiatan Pendukung PMK 212.
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana PPKS, Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat (RTLH) pengadaan Bangunan Warbinsos, Jumlah Pemberian Bantuan UEP Fakir Misikn dan UEP KUBE	25 RTLH, 1 kali sosialisasi, 1 unit warbinsos, 50 KPM dan 5 klp	550.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	-	Kegiatan Pindah ke Kegiatan Pendukung PMK 212.
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Karang Taruna mengikuti sosialisasi dan lomba karang taruna dan jumlah PPKS kelembagaan masyarakat yang diberdayakan	80 karang taruna, 11 LKS, 1 LKKS, sosialisasi dan musda LKKS	1.071.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	-	Kegiatan Pindah ke Kegiatan Pendukung PMK 212.
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Sosial dan Penyerahan Bantuan untuk Masyarakat	1 Sosialisasi, 10 Orang Bantaun	175.000.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sertifikasi yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	-	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	25%	75.000.000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	0	-	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	25%	75.000.000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	0	-	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	1 orang	75.000.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	0	-	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85%	4.654.000.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85%	4.702.223.700	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	85%	3.884.000.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	85%	1.900.078.800	
	Penyediaan Permakanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan Permakanan bagi Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial serta UEP bagi Lansia	2000 Orang Permakanan Lansia dan 30 orang UEP Lansia	2.400.000.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	Kegiatan Pindah ke Kegiatan Pendukung PMK 212.
	Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar dan Bayi terlantar	100 Orang	210.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	Kegiatan Pindah ke Kegiatan Pendukung PMK 212.
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Alat Bantu cacat bagi Lansia	85 Orang	280.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	Kegiatan Pindah ke Kegiatan Pendukung PMK 212.
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	60 Kasus ABH/Anak Terlantar	84.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	Kegiatan Pindah ke Kegiatan Pendukung PMK 212.

Rancangan Awal RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelatihan, Pelayanan dan Bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas dan Tersedianya Rumah Idaman/UILS/Rumah Hantara/Rumah Singgah	50 Orang dan 1 Unit Rumah Singgah	300.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	255.000.000	Kegiatan PMK 212
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	25 Orang	150.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	175.000.000	Kegiatan PMK 212
	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pelatihan bagi anak terlantar dan putus sekolah dan pengiriman anak ke panti rehabilitasi dan bimbingan lanjut untuk anak terlantar (putus sekolah)	80 Orang	200.000.000	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1395 Orang	1.470.078.800	Kegiatan PMK 212
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	5 Orang	30.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2024
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5 Orang	30.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2024
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi	30 Orang	200.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	Kegiatan Pindah ke Kegiatan Pendukung PMK 212.
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	85%	770.000.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	85%	2.802.144.900	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	10 Orang	30.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2024
	Penyediaan Permakanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Permakanan	30 Orang	30.000.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Permakanan	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2024

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Sandang	30 Orang	30.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Sandang	0		- Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2024
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	15 Orang	30.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	0		- Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2024
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	10 Orang	30.000.000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	0		- Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2024
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan bantuan UEP dan bimbingan lanjut untuk wanita tuna susila	25 Orang	250.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	859.480.200	Kegiatan PMK 212
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	10 Orang	30.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	183 Orang	814.646.000	Kegiatan PMK 212
	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, PBI, JKSS, PBI Jamkesda dan PBI JKN APBD Serta Sosialisasi.	Jamkesda 18.500, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa	180.000.000	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	21.239	1.128.018.700	Kegiatan PMK 212
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10 Orang	30.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	0		- Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2024
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10 Orang	30.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0		- Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2024
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Layanan Rujukan	10 Orang	30.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Layanan Rujukan	0		- Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2024

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pant di Kabupaten Lima Puluh Kota dan jumlah tenaga pembina anak terlantar yang mengikuti bimbingan teknis.	9 Pant 25 orang	70.000.000	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2024
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		<b>Persentase Jumlah Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>85%</b>	<b>1.765.000.000</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		<b>Persentase Jumlah Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>85%</b>	<b>-</b>	
	<b>Pemeliharaan Anak Terlantar</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Anak Terlantar</b>	<b>85%</b>	<b>155.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Anak Terlantar</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Anak Terlantar</b>			
	Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	17 orang	40.000.000	Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	0	-	
	Rujukan Anak - Anak Terlantar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rujukan Anak - Anak Terlantar	20 orang	60.000.000	Rujukan Anak - Anak Terlantar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rujukan Anak - Anak Terlantar	0	-	
	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	25 orang	55.000.000	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	0	-	
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten</b>	<b>95%</b>	<b>1.610.000.000</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten</b>	<b>95%</b>	<b>-</b>	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data DTKS serta Pendataan PMKS dan PSKS	13 Kecamatan	425.000.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	-	Kegiatan ini pindah ke kegiatan PMK 212
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) Sembako	24.994 KPM	160.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	-	Kegiatan ini pindah ke kegiatan PMK 212
	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Monitoring Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	16.898 orang KPM	375.000.000	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	Kegiatan ini pindah ke kegiatan PMK 212
	Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) serta Bantuan UEP untuk KTK dan WRSE	25 KTK, 25 WRSE dan 50 Bantuan UEP	650.000.000	Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	Kegiatan ini pindah ke kegiatan PMK 212

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>		<b>Persentase Korban Bencana yang Tertangani</b>	<b>100%</b>	<b>478.000.000</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>		<b>Persentase Korban Bencana yang Tertangani</b>	<b>100%</b>	<b>265.247.400</b>	
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten</b>	<b>95%</b>	<b>278.000.000</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten</b>	<b>95%</b>	<b>265.247.400</b>	
	Penyediaan Makanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Makanan untuk Korban Bencana dan Pembangunan Gudang Logistik	150 Paket	100.000.000	Penyediaan Makanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	173 Orang	193.997.400	Kegiatan Pendukung PMK 212 Bidang Kesehatan
	Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Sandang untuk Korban Bencana	150 Paket	100.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	173 Orang	71.250.000	Kegiatan Pendukung PMK 212 Bidang Kesehatan
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1 Unit	50.000.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2024 karena keterbatasan anggaran
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Mayat terlantar dan orang terlantar dalam perjalanan	2 orang mayat terlantar dan 10 orang terlantar dalam perjalanan	15.000.000	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	Kegiatan ini pindah ke kegiatan PMK 212
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penggantian Transportasi Tagana dan selter pengungsi	82 Orang Tagana	13.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	Kegiatan ini pindah ke kegiatan PMK 212
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Terbentuknya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten</b>	<b>95%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Terbentuknya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten</b>	<b>95%</b>	<b>-</b>	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi untuk Tagana dan Masyarakat rawan Bencana	1 Sosialisasi 1 Kampung Siaga Bencana	100.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dan Perekrutan Tagana Muda	25 orang	100.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>		<b>Terkelolanya Makam Pahlawan</b>	<b>95%</b>	<b>190.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>		<b>Terkelolanya Makam Pahlawan</b>	<b>95%</b>	<b>-</b>	
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Jumlah Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten</b>	<b>95%</b>	<b>190.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Jumlah Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten</b>	<b>95%</b>	<b>-</b>	
	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rehab Sarana dan Prasarana Makam Pahlawan dan Peringatan Hari Pahlawan 10 November	1 Rehab dan 1 Kali Peringatan	120.000.000	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	Kegiatan ini pindah ke kegiatan PMK 212
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Makam	50.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Makam	-	
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah hari kerja THL yang dibayarkan	12 Bulan	20.000.000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	-	
			Total		<b>16.334.407.000</b>			Total		<b>8.278.634.914</b>	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat. Mulai dari Musrenbang Nagari, Kecamatan sampai dengan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten maupun Forum OPD Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Sosial berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2024, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan ada yang diarahkan secara khusus untuk Dinas Sosial. Tetapi ada satu hal penting yang disampaikan masyarakat bahwa Dinas Sosial harus mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, jangan hanya memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas.

Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius Dinas Sosial dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Sosial dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien. Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2024 disajikan pada tabel II.7 berikut :

Tabel II.7 (T-C.32.)					
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024					
Kabupaten Lima Puluh Kota					
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial					
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<b>MUSRENBANG</b>					
<b>1</b>	<b>Program : REHABILITASI SOSIAL</b>				
1	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
a	Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Disabilitas dan Alat Bantu cacat)	17 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
b	Sub Kegiatan : Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Permakanan Lansia, UEP Lansia, UEP Anak Terlantar dan sandang.)	375 orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
a	Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (pemberian bantuan sosial yaitu usaha Ekonomi produktif (UEP) barang bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Korban Tindak Kekerasan (KTK)	25 orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
b	Sub Kegiatan :Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota ( UEP Fakir Miskin dan KUBE)	6 Orang dan 1 Kelompok	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah



POKOK PIKIRAN DPRD					
1	<b>Program : REHABILITASI SOSIAL</b>				
1	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
a	Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Disabilitas dan Alat Bantu cacat)	13 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
b	Sub Kegiatan : Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Permakanan Lansia, UEP Lansia, UEP Anak Terlantar dan sandang.)	722 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
2	Kegiatan :Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
a	Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (pemberian bantuan sosial yaitu usaha Ekonomi produktif (UEP) barang bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Korban Tindak Kekerasan (KTK)	253 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
b	Sub Kegiatan :Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota ( UEP Fakir Miskin dan KUBE)	184 Orang dan 53 Kelompok	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah

Pada tabel II.7 usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 yaitu pada forum Musrenbang Kecamatan adalah :

Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial. Indikator pada Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang Disabilitas dan pemberian Alat Bantu cacat bagi penyandang disabilitas dengan target yang direncanakan sebanyak 17 orang dengan rincian untuk UEP Disabilitas sebanyak 5 orang dan Alat bantu cacat bagi penyandang disabilitas sebanyak 12 orang. Sub Kegiatan Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan indikator keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator pada sub kegiatan ini adalah pemberian bantuan sosial berupa bantuan permakanaan bagi Lanjut Usia , Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi lanjut usia, Bantuan Usaha Ekonomi bagi Anak Terlantar dan bantuan sandang, dengan target sebanyak 375 orang. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, Indikator sub kegiatan Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (pemberian bantuan sosial yaitu bantuan sosial usaha Ekonomi produktif (UEP) bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Korban Tindak Kekerasan (KTK) sebanyak 25 orang. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA. Indikator keluaran sub kegiatan jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu pemberian bantuan Usaha Ekonomi

Produktif (UEP) Fakir Miskin sebanyak 6 orang dan bantuan sosial untuk Kelompok Usaha Bersama( KUBE) sebanyak 1 Kelompok.

Usulan Pokok- Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 usulan yang layak adalah pada adalah :

Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial. Indikator pada Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang Disabilitas dan pemberian Alat Bantu cacat bagi penyandang disabilitas dengan target yang direncanakan sebanyak 13 orang dengan rincian untuk UEP Disabilitas sebanyak 10 orang dan Alat bantu cacat bagi penyandang disabilitas sebanyak 3 orang. Sub Kegiatan Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan indikator keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota. Pada sub kegiatan ini adalah pemberian bantuan sosial berupa bantuan permakanan Lanjut Usia , Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi lanjut usia, Bantuan Usaha Ekonomi bagi Anak Terlantar dan bantuan sandang.) dengan target sebanyak 722 orang. Dengan rincian bantuan permakanan lansia 684 orang, UEP lansia 9 orang, UEP anak terlantar 25 orang dan bantuan sandang 4 orang. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Sub kegiatan Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (pemberian bantuan sosial yaitu bantuan sosial usaha Ekonomi produktif (UEP) bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Korban Tindak Kekerasan (KTK) sebanyak 253 orang. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA. Indikator keluaran sub kegiatan jumlah Peserta dalam Pemberian

Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin sebanyak 184 orang dan bantuan sosial untuk Kelompok Usaha Bersama( KUBE) sebanyak 53 Kelompok.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi dan Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJMN 2020-2024 yaitu :

Visi :

“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian  
Berlandaskan Gotong Royong “

Misi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan Rasa Aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Rangka Negara Kesatuan.

5 (lima ) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Presiden di RPJMN, ke lima arahan tersebut mencakup :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Arahan utama RPJMN 2020-2024 untuk Dinas Sosial pada arahan pertama yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), strategi pembangunan SDM adalah Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial yang terdiri dari :

1. Tata Kelola Kependudukan
2. Perlindungan Sosial
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Pengentasan Kemiskinan
6. Kualitas anak, perempuan dan Pemuda.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial**

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial (Renstra Dinas Sosial) Tahun 2021-2026, maka telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut Visi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 yaitu :

#### **a. Pernyataan Visi**

**“Mewujudkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mandiri dan Bermartabat ”**

Merujuk kepada visi tersebut lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
- b. Mandiri adalah keadaan dapat berdiri sendiri tidak bergantung kepada orang lain. PPKS Mandiri adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar tanpa tergantung kepada orang lain.
- c. Bermartabat adalah Seseorang yang memiliki kehormatan, kemuliaan, gengsi, marwah, kewibawaan dan nama baik yang setara dan sederajat dengan orang lain dan lingkungannya

#### **d. Pernyataan Misi di susun sebagai berikut :**

- 1. Meningkatkan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial , perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2. Meningkatkan profesionalisme Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
3. Membangun kepedulian sosial seseorang, keluarga, masyarakat, pelaku usaha dan pihak ketiga lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

**e. Tujuan dan sasaran**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan :

- Meningkatnya Pelayanan Prima dan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- Meningkatnya Profesionalisme Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- Meningkatkan Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Tersalurnya bantuan sosial yang tepat guna dan tepat sasaran
- Membangun kepedulian sosial seseorang, keluarga, masyarakat, pelaku usaha dan pihak ketiga lainnya.

2. Sasaran

- Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- Peningkatan Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)



- Meningkatkan penyaluran bantuan bagi KK atau Masyarakat yang tertimpa bencana
- Meningkatnya jumlah seseorang yang memiliki semangat kepedulian.

#### Sasaran Program Urusan Sosial

- *Kemiskinan*, meliputi kelompok warga yang karena sesuatu hal baik karena faktor internal individu maupun faktor eksternal individu mengakibatkan ketidakmampuan sosial ekonomi atau rentan menjadi miskin yakni: (1) keluarga fakir miskin; (2) dan wanita rawan sosial ekonomi.
- *Keterlantaran*, meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial yakni: (1) balita terlantar, (2) anak remaja terlantar, termasuk anak jalanan dan pekerja anak, (3) keluarga bermasalah sosial psikologis, dan (4) lansia terlantar
- *Kecacatan*, meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan sehingga terganggu fungsi sosialnya, yakni: (1) tuna daksa, (2) tuna netra, (3) tuna rungu/wicara, (4) tuna grahita, dan (5) cacat ganda
- *Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku*, meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian (*social adjustment*) secara normatif, yakni: (1) tindak tuna susila, (2) anak konflik dengan hukum/ nakal, (3) eks warga binaan, (4) korban narkoba, (5) gelandangan; (6) pengemis dan (7) korban HIV/AIDS dan (8) eks penyakit kronis terlantar.
- *Akibat Bencana*, meliputi warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana, yakni: (1) korban bencana alam, dan (2) korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya.
- *Korban Tindak Kekerasan* meliputi warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, seperti: (1) anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk (2) wanita korban tindak kekerasan, (3) lanjut usia korban tindak kekerasan, dan (4) pekerja migran korban tindak kekerasan.

- Potensi dan sumber kesejahteraan sosial meliputi: (1) Pekerja Sosial Profesional (2) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) (3) Taruna Siaga Bencana (TAGANA) (4) Keluarga Pioner (5) Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (6) Penyuluh Sosial (7) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (8) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) (9) Karang Taruna (10) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) (11) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) (12) Dunia Usaha

### **3.3 Program dan Kegiatan Dinas Sosial**

Penetapan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial untuk Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2024 mengacu kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas Sosial dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang Sosial. Ringkasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

**Tabel III.1**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**  
**Kabupaten/ Kota**

<b>A.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>:</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>
1.	Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2.	Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3.	Kegiatan	:	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4.	Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangun Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Fasilitas Kunjungan Tamu 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.	Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.	Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

			2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.	Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 1 Program 7 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan.

**Tabel 3.3.2**

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintah Bidang Sosial**

<b>A.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>:</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>
1.	Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial
	Sub Kegiatan	:	1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial 2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat 3. Pemberian Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan dasar
2.	Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial
	Sub Kegiatan	:	1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial 2. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA. 3. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
<b>B.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>:</b>	<b>PENANGANAN BENCANA</b>

3.	Kegiatan	:	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Makanan 2. Penyediaan Sandang

Jumlah Urusan Pemerintah Bidang Sosial 2 Program 3 Kegiatan 8 Sub Kegiatan.

Berdasarkan tabel diatas maka tahun 2023 Dinas Sosial melaksanakan 3 Program, 10 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan pendukung dari pencapaian IKU, IKD, SDG'S, PUG dan SPM Dinas Sosial.

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Rehabilitasi Sosial dan Program Bencana. Program pendukung PUG adalah Program Rehabilitasi Sosial.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

#### 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra PD tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Selanjutnya penyempurnaan indikator kinerja subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 dikelompokkan dalam 2 urusan, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan 3 Program, 10 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan seperti tercantum pada Tabel 4.1, Tabel 4.2. Uraian Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan urusan, Jumlah Program dan Kegiatan tahun 2024 Tabel 4.1 dan Renjana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Sosial tahun 2024 dapat dilihat pada tabl 4.2.

**Tabel 4.1**

**Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024**

NO	Bidang Urusan	Tahun 2024		Tahun 2025 Pagu Indikatif (Rp.)	Tahun 2024		Tahun 2025 Total Pagu Indikatif (Rp)	Ket
		Program			Kegiatan			
		Jumlah	Total Pagu (Rp.)		Jumlah	Total Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Urusan Pemerintah an Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1	3.311.163.814	4.837.242.740	7	3.311.163.814	4.837.242.740	
2	Urusan Pemerintah an Bidang Sosial	3	4.967.471.100	6.648.824.570	10	4.967.471.100	6.648.824.570	

Tabel 4.2

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS SOSIAL KAB. LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRADA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KEMERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL						8.278.634.914,00							11.486.867.310,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.278.634.914,00							11.486.867.310,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						8.278.634.914,00							11.486.867.310,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penyempurnaan Urusan Pemerintah Daerah	-			99 %	3.311.163.914,00						-	4.837.242.740,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sifat/klasifikasi Perencanaan dan Evaluasi/ Pembangunan Daerah	-			95 %	9.029.000,00			Memperkuat Stabilitas Politik/ekonomi dan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	89.510.740,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.734.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik/ekonomi dan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		15.794.010,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-GKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARU-1 ANHER PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PROYEKSI CAPAIAN TARUET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKTIKAS MAJU MENCANA TAHUN 2023		PERAKIBAT DAIRAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAIRAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Real Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kot/Desa	DANA TRANSFER UMUM (DANA ALOKASI UMUM)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Modern	Kabupaten Lima Puluh Kota		8.028.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0023		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Real Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kot/Desa	DANA TRANSFER UMUM (DANA ALOKASI UMUM)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Modern	Kabupaten Lima Puluh Kota		8.028.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0024		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan / Real Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kot/Desa	DANA TRANSFER UMUM (DANA ALOKASI UMUM)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Modern	Kabupaten Lima Puluh Kota		8.090.290,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0025		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PASU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PASU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				8 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		6.732.220,00	DNAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	4.375.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku a Stabilitas Politik-hank an Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		14.852.460,00	DNAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	1.925.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku a Stabilitas Politik-hank an Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		6.800.000,00	DNAS SOSIAL

NO	KODE	URUTAN / RENCANA URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARJAH AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REKAPITULASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKTIK CAPAIAN TARJAH RENCANA OPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKSI MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENDANAAN JAWAB	
							TARGET 2024	PADA INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PADA INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan pagu dan anggaran ASN untuk penyusunan Laporan OPD	-			99 %	2.023.197.814,00			Memperkuat Stabilitas Fiskal dan Transparansi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	3.897.391.210,00	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.02.001 Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				97 Gunggung	2.919.298.814,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Fiskal dan Transparansi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		3.811.193.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		33.090.770,00	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.02.005 Koordinasi dan Pengurusan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Harat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.660.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kari/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Demokrasi	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Lima Puluh Kota		4.999.940,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				8 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kari/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Lima Puluh Kota		3.432.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.038.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kari/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Demokrasi	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Lima Puluh Kota		3.910.900,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.08	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			95 %	1.089.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas. Penguatan peran Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	0.107.200,00	DINAS SOSIAL
1.05.01.2.03.0001																
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas. Penguatan peran Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		3.071.200,00	DINAS SOSIAL
1.05.01.2.03.0005																
Monev dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
			Jumlah Laporan Monev dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1.993.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas, Pertumbuhan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas. Penguatan peran Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		3.036.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SARAFAN	PRAKIRAAN MAJU KENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			95 %	0,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas. Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	49.495.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0002 Pengaturan Rukun Dinas beserta Akibat Kelengkapannya																
			Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Akibat Kelengkapannya				0 Paket	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI FUNGSI	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas. Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		38.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.0011 Rimbungan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Rimbungan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI FUNGSI	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas. Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		10.696.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAOU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAOU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Pelaksanaan Administrasi Umum	-			65 %	66.755.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas. Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	217.202.490,00	DINAS SOSIAL
1.05.01.2.05.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	6.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas. Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.05.01.2.05.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	26.940.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Demokrasi dan Transparansi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas. Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		45.782.770,00	DINAS SOSIAL
1.05.01.2.05.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																

NO	KODE	URUSAN / KIDANH URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODIC RENKTRA OPD	KENDAHAN CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKARAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKARAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PANGKINUMAH (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TANGGAL	PANGKINUMAH (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Gizi dan Pengkondisian yang Disediakan				12 Paket	22.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Cesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		33.285.770,00	DINAS SOSIAL
	1.05.01.2.05.0000	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perlengkapan Pendidikan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Cesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		5.445.000,00	DINAS SOSIAL
	1.05.01.2.05.0000	Fasilitasi Kunjungan Tani														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tani				12 Laporan	10.500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Cesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Penguatan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		10.917.250,00	DINAS SOSIAL
	1.05.01.2.05.0000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRATA OPD TAHUN 2023	PRAKISAA CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KEMAMPUAN PENDANAAN						KELOMPOK KAWASAN	PRAKISAA MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAHAP 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	33.250.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Demokrasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengentangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		103.770.700,00	DINAS SOSIAL
	1.26.01.2.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Tersebut Usulan Penerimaan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penerimaan Usulan Penerimaan Daerah	-			95 %	19.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan dan berdaya saing Pengentangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	84.172.000,00	DINAS SOSIAL
	1.26.01.2.07.0000	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Didistribusikan				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan dan berdaya saing Pengentangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		24.222.000,00	DINAS SOSIAL
	1.26.01.2.07.0000	Pengadaan Produk dan Mesin Lempar														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PEKANUKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PACU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PACU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Prestasi dan Measur yang Disediakan				10 Unit	10.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.05.01.2.05	Penyediaan Jasa Pemungutan Lisensi Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pemungutan Lisensi Pemerintahan Daerah	-			95 %	57.792.000,00			Memperkuat Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	304.161.000,00	DINAS SOSIAL
	1.05.01.2.05.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.042.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		2.090.000,00	DINAS SOSIAL
	1.05.01.2.05.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TANGGAL AKHIR PERIODE REKSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REKSTRA OPD TAHUN 2022	PROYEKSI CAPAIAN TANGGAL REKSTRA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PROYEKSI MAJU RENCANA TAHUN 2023		PEMANGKAT DAERAH PEMANGKAT JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Sosial Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan dibayarkan Pajak dan Punyananya				01 Unit	100.800.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Keamanan Dan Tran- sformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola perpelayanan dan pem- ertahanan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba- ngan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		301.630.100,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0000 Peneliti dan Relawan dan Media Lainnya																
			Jumlah Relawan dan Media Lainnya yang Diperiksa				25 Unit	7.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Keamanan Dan Tran- sformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola perpelayanan dan pem- ertahanan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba- ngan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		18.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0000 Peneliti dan Relawan dan Media Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Kelembagaan				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola perpelayanan dan pem- ertahanan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba- ngan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.02 PROGRAM PEMBENDAYAAN SOSIAL																
2	1.06.02	PROGRAM PEMBENDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang di Berdayakan	-			55 %	0,00						-	2.117.361.180,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	-			95 %	0.00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg ataan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	2.117.981.180,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0.00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg ataan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		279.890.400,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0.00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saling Pengemba ngan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		107.800.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PENANUT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertentu, Anak Tertentu, Lanjut Usia Tertentu, serta Bekas Korban Penganiayaan di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertentu, Anak Tertentu, Lanjut Usia Tertentu, serta Bekas Korban Penganiayaan di Luar Panti Sosial	-			95 %	1.900.075.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi huan, mandiri dan berdaya saling Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	1.000.075.000,00	DINAS SOSIAL
	1.05.04.2.01.0001	Penyediaan Pemukiman														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemukiman Sesuai dengan Standar Ciri Minimal Pemukiman Kabupaten/Kota				0 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi huan, mandiri dan berdaya saling Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.05.04.2.01.0002	Penyediaan Samping														
			Jumlah Orang yang Menikmati Fasilitas dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewaspadaan Kabupaten/Kota				0 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi huan, mandiri dan berdaya saling Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.05.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRANS OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DASAR PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Orang	0.00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		79.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Orang	0.00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		79.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Psik, Mental, Spiritual, dan Sosial																
			Jumlah Peserta Bimbingan Psik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	256.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		112.200.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Rinkablogan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Tertentu; Anak Tertentu; Lanjut Usia Tertentu; serta Berkeseluruhan Pemuda dan Masyarakat Kawasannya Kabupaten Kota				30 Orang	175.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, berprestasi, dan berdaya saing	Kabupaten Lima Puluh Kota		54.450.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0008 Pembinaan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kecamatan Bener Kabupaten Kota				1355 Orang	1.470.078.800,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, berprestasi, dan berdaya saing	Kabupaten Lima Puluh Kota		59.400.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0012 Pembinaan Layanan Rujukan																
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kecamatan Kawasannya Kabupaten Kota				0 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, berprestasi, dan berdaya saing	Kabupaten Lima Puluh Kota		00.800.000,00	DINAS SOSIAL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU KENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAJU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAJU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-			85 %	2.822.144.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sang	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi dan, berdaya sang Pengembangan Masyarakat Mandiri	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	1.942.348.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Psik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Psik, Mental, Spiritual dan Sosial Kemasyarakatan Kabupaten Kota				5 Orang	859.480.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sang	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi dan, berdaya sang Pengembangan Masyarakat Mandiri	Kabupaten Lima Puluh Kota		38.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA														
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kemasyarakatan Kabupaten Kota				100 Orang	314.848.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi dan, berdaya sang	Kabupaten Lima Puluh Kota		314.848.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRAS OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kecamatan Kabupaten/Kota				212391 Orang	1.125.819.700,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saling Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		189.208.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penemuan Perilaku dan Jaminan Sosial	-			95 %	0,00						-	1.065.265.936,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-			95 %	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saling Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	1.065.265.936,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditela				0 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saling Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		425.925.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEHUTANAN / RUK KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUR KEHUTANAN	TARGET AKHIR PERIODE KEHUTANAN (OPD)	REALISASI CAPAIAN REHUTANAN (OPD) TAHUN 2022	PRAKARAAN CAPAIAN TARGET REHUTANAN (OPD) TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KEMAMPUAN PEMERINTAH						KELOMPOK SARAFIKAN	PRAKARAAN MAJU REHUTANAN TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH JAWAB
							TAHAP 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengantrean Pelayanan Kesehatan Kabupaten Kota				0 Keluarga	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi dan berdaya saling Pemerintah Kabupaten Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota		72.809.850,00	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0003 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																
			Jumlah Keluarga Penerima Makanan (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kota				0 Keluarga	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi dan berdaya saling Pemerintah Kabupaten Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota		183.274.810,00	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0004 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Kota				0 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi dan berdaya saling Pemerintah Kabupaten Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota		438.261.870,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	-			100 %	205.247.400,00						-	181.271.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANALIS PERIODE RESTRAS OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANUTSUNU JAWAB
							TARGET 2024	PACU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PACU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.00.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Kota	Persentase Pendudukan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Kota	-			95 %	285.347.400,00			Membangun Lingkungan Hidup, Men- ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, berkeadilan, berdaya saling Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	281.444.280,00	DINAS SOSIAL
1.06.00.2.01.0001 Pengadaan Makanan																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Makanan Beri Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Penggunaan) Kecamatan Kabupaten Kota				173 Orang	163.997.400,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Men- ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, berkeadilan, berdaya saling Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		162.891.620,00	DINAS SOSIAL
1.06.00.2.01.0002 Pengadaan Samping																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakan dan Kekurangan Lainnya yang Tersebar pada Masa Tanggap Darurat (Penggunaan) dan Pusat Darurat Kecamatan Kabupaten Kota				173 Orang	71.360.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Men- ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, berkeadilan, berdaya saling Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		161.681.680,00	DINAS SOSIAL
1.06.00.2.01.0004 Pengadaan Kebutuhan bagi Kelompok Rentan																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSIKA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SARAPAN	PRAKIRAAN MAJU KENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENGANGKUTAN JAWAR
							TAHAP 2024	PACU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PACU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan di Kecamatan Kabupaten Kota				0 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kali Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, terampil dan berdaya saing dengan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		10.230.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.08.2.01.0006		Pelayanan Dukungan Perkotaan														
			Jumlah Kader Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Perkotaan Kecamatan Kabupaten Kota				0 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kali Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, terampil dan berdaya saing dengan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		17.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.08.2.02		Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kelembagaan Bencana Kabupaten Kota	Pemetaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kelembagaan Bencana Kabupaten Kota	-		85 %		0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, terampil dan berdaya saing dengan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	129.827.380,00	DINAS SOSIAL
1.06.08.2.02.0001		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REVISI OPD	REALISASI CAPAIAN REVISI OPD TAHUN 2022	PRAKTIKAN CAPAIAN TARGET REVISI OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KETAHERAPAN PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKTIKAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PANGKIMATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PANGKIMATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kampung yang Awakamalkan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Duga Bencana Kebudayaan Kabupaten Kota				0 Kampung	0,00	- Kota Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpenghasilan, terampil dan berdaya saling Pemberdayaan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		77.244.970,00	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Duga Bencana																
			Jumlah Orang yang Awakamalkan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Duga Bencana Kebudayaan Kabupaten Kota				0 Orang	0,00	- Kota Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpenghasilan, terampil dan berdaya saling Pemberdayaan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		80.880.310,00	DINAS SOSIAL
8	1.06.07	PROGRAM PENCELAHAN TAJAM MAKAM PAHLAWAN	Persentase Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik	-			35 %	0,00						-	34.210.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota	-			35 %	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpenghasilan, terampil dan berdaya saling Pemberdayaan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	34.210.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pengembangan Masyarakat Madani	Kabupaten Lima Puluh Kota		34.210.000,00	DINAS SOSIAL
			JUMLAH					8.278.634.914,00							11.486.067.310,00	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2024 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang tingkat Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kabupaten dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial juga tidak terlepas dari Renstra Dinas Sosial Tahun 2021 s/d 2026 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial selama 5 Tahun sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya serta dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Renja Dinas Sosial ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Sosial ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Sosial, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Sosial juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Sosial dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau



awal tahun 2024, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun yang akan datang.



KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS  
SOSIAL  
LIMA PULUH KOTA  
IF. INDRA SURIANI  
NIP. 19670812 199303 2 011



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

---

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 905/333/BUP-LK/XII/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO***

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan huruf a diatas perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 103);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
  - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023;
  - b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 Perangkat Daerah seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya.
  - c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
  - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

**KEEMPAT** : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan

pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

**KELIMA**

- : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

**KEENAM**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 20 Desember 2022



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**  
NOMOR : 905/333/BUP-LK/XII/2022  
TANGGAL : 20 DESEMBER 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM  
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA  
KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA  
PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-  
OFFICIO*

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kabag Organisasi	Anggota
	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kabag Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Anggota
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Kabag Umum	Anggota
	Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pelaporan	Anggota
	Kasubag Protokol	Anggota
	Subkoordinator Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Subkoordinator Dokumentasi Pimpinan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan Dan Anjab	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Anggota
	Subkoordinator Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Anggota
	Subkoordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Perlengkapan	Anggota
	Subkoordinator Rumah Tangga	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Penyusunan Program	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Program	Anggota
	Subkoordinator Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan BUMD Dan BLUD	Anggota
	Subkoordinator Perekonomian	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Alam	Anggota
	Subkoordinator Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
	Subkoordinator Bantuan Hukum	Anggota
	Subkoordinator Dokumentasi Dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Bina Mental Dan Spiritual	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Administrasi Pemerintahan Dan Kewilayahan	Anggota
	Subkoordinator Otonomi Daerah	Anggota
	Subkoordinator Kerjasama Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
2.	<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Subkoordinator Fasilitas Penganggaran	Anggota
	Subkoordinator Program dan Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Kajian Perundang-Undangan	Anggota
	Subkoordinator Humas, Protokol, dan Publikasi	Anggota
	Subkoordinator Fasilitas Pengawasan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Rumah Tangga	Anggota
	Subkoordinator Persidangan dan Risalah	Anggota
	Subkoordinator Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	<b>INSPEKTORAT</b>	
	Inspektur	Ketua
	Sekretariat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	Anggota



No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Perencanaan	Anggota
	Subkoordinator Analisis Dan Evaluasi	Anggota
	Kasubag Administrasi Umum Dan Keuangan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
4.	DINAS KESEHATAN	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris 1
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Sekretaris 2
	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Subkoordinator Surveilens, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
	Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Kabag Tata Usaha RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Sarana Prasarana Dan Logistik RSUD dr Achmad Darwis	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Perencanaan Dan Pelaporan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Penunjang Medis RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Penunjang Non Medis Dan Promosi Kesehatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Medis RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Perawatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kasubag Keuangan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kasubag Umum dan Humas RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kasubag Kepegawaian Dan Pengembangan SDM RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
	Pelaksana pada RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
	Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan dan Sarana Prasana	Anggota
	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
	Subkoordinator PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Subkoordinator Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Subkoordinator Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Subkoordinator Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Subkoordinator Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Subkoordinator Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Subkoordinator Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota
	Subkoordinator Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Subkoordinator Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Kasi Pertanahan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Subkoordinator Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
7.	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kepala Bidang Trantib	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang PPUD	Anggota
	Kepala Bidang SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Intelijen	Anggota
	Kasi Trantib & Pengamanan	Anggota
	Kasi Operasional & Logistik	Anggota
	Kasi Bina Potensi	Anggota
	Subkoordinator Data Informasi	Anggota
	Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kasi Penegakan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pelatihan Dasar	Anggota
	Subkoordinator Teknis Fungsional	Anggota
	Kasi Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
8.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran	Sekretaris
	Kabid Pencegahan	Anggota
	Kabid Pemadam Dan Penyelamatan	Anggota
	Kabid Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan Dan Inspeksi	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Operasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Pemadam Dan Investigasi	Anggota
	Kasi Penyelamatan Dan Evakuasi	Anggota
	Kasi Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Prasarana	Anggota
	Subkoordinator Informasi Dan Pengelolaan Data	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
9.	DINAS SOSIAL	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Anggota
	Subkoordinator Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Subkoordinator Identikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
10.	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Identitas Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Pendataan Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Kelahiran	Anggota
	Subkoordinator Perkawinan dan Perceraian	Anggota
	Subkoordinator Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian	Anggota
	Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Subkoordinator Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Subkoordinator Kerjasama	Anggota
	Subkoordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota
	Subkoordinator Inovasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Subkoordinator Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Subkoordinator Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota
	Subkoordinator Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Subkoordinator Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Subkoordinator Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Subkoordinator Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
<b>12.</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan dan BMD	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Promosi	Anggota
	Subkoordinator Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Subkoordinator Data dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Subkoordinator Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Pemantauan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
13.	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH</b>	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Subkoordinator Metrologi	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Subkoordinator Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Subkoordinator Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
14.	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Subkoordinator Perizinan dan Data	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Subkoordinator Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Subkoordinator Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Subkoordinator Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Subkoordinator Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Subkoordinator Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
15.	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Komunikasi Publik	Anggota
	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Anggota
	Subkoordinator Pengelola Media Komunikasi Publik	Anggota
	Subkoordinator Layanan Hubungan Media Dan Kehumasan	Anggota
	Subkoordinator Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Anggota



No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Anggota
	Subkoordinator Aplikasi	Anggota
	Subkoordinator Statistik Sektor Ekonomi Dan Infastruktur	Anggota
	Subkoordinator Statistik Sektor Pemerintahan Dan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Subkoordinator Identifikasi Deteksi Dan Proteksi Keamanan SIBER	Anggota
	Subkoordinator Penanggulangan Pemulihan Pemantauan Dan Pengendalian	Anggota
	Subkoordinator Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
16.	<b>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Subkoordinator Promosi dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Subkoordinator Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Subkoordinator Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Subkoordinator Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Subkoordinator Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
17.	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI</b>	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Subkoordinator Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
18.	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Lalu Lintas	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Kasi Pengujian Sarana	Anggota
	Kasi Angkutan	Anggota
	Kasi Pengoperasian Prasarana	Anggota
	Kasi Perawatan Prasarana	Anggota
	Subkoordinator Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Kasi Lingkungan Perhubungan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
<b>19.</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN</b>	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Subkoordinator Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Perumahan	Anggota
	Subkoordinator Kawasan Permukiman	Anggota
	Subkoordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota
<b>20.</b>	<b>DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN</b>	
	Kepala Distanhorbun	Ketua
	Sekretaris Distanhorbun	Sekretaris
	Kabid Sarana	Anggota
	Kabid Prasarana	Anggota
	Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha	Anggota
	Kabid penyuluhan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Keuangan Dan Aset	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Pupuk Dan Pestisida	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Genetik	Anggota
	Subkoordinator Alat Dan Mesin Pertanian	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Prasarana	Anggota
	Subkoordinator Irigasi	Anggota
	Subkoordinator Infrastruktur Pertanian	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Tanaman	Anggota
	Subkoordinator Penanganan Dampak Perubahan Iklim Dan Bencana Alam	Anggota
	Subkoordinator Perizinan Dan Pembinaan Usaha	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan	Anggota
	Subkoordinator Ketenagaan	Anggota
	Subkoordinator Penyelenggaraan Penyuluhan	Anggota
	Pelaksana pada Distanhorbun	Anggota
21.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan,Kesmavet,Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Non Ruminansia	Anggota
	Subkoordinator Ruminansia	Anggota
	Subkoordinator Perbibitan	Anggota
	Subkoordinator Kesmavet	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Hewan	Anggota
	Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Subkoordinator Pakan	Anggota
	Subkoordinator Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Subkoordinator Lahan dan Irigasi	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan	Anggota
	Subkoordinator Metode dan Infomasi	Anggota
	Subkoordinator Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
22.	DINAS PERIKANAN	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutfah	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Mutu Pembudiyaan Ikan	Anggota
	Subkoordinator Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
23.	DINAS PANGAN	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Ketersediaan Pangan	Anggota
	Subkoordinator Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Subkoordinator Kerawanan Pangan	Anggota
	Subkoordinator Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Subkoordinator Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>24.</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
<b>25.</b>	<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
26.	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM</b>	
	Kepala BKPSDM	Ketua
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Subkoordinator Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Subkoordinator Kepangkatan	Anggota
	Subkoordinator Mutasi	Anggota
	Subkoordinator Displin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Subkoordinator Status ASN	Anggota
	Subkoordinator Informasi ASN	Anggota
	Subkoordinator Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
27.	<b>BADAN KEUANGAN</b>	
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Subkoordinator 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Subkoordinator 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
28.	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Bina Ideologi	Anggota
	Subkoordinator Bina Wasbang	Anggota
	Subkoordinator Bintang, Eksosbud Dan Agama	Anggota



No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	Anggota
	Subkoordinator HAL Dan Fasilitas Pemilu	Anggota
	Subkoordinator Fasilitas Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
29.	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pencegahan	Anggota
	Subkoordinator Kesiapsiagaan	Anggota
	Subkoordinator Kedaruratan	Anggota
	Subkoordinator Logistik	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi	Anggota
	Subkoordinator Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
30.	<b>KECAMATAN GUGUAK</b>	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota
31.	<b>KECAMATAN PAYAKUMBUH</b>	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
32.	KECAMATAN MUNGKA	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
33.	KECAMATAN SULIKI	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
34.	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
35.	<b>KECAMATAN GUNUANG OMEH</b>	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
36.	<b>KECAMATAN LUAK</b>	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
37.	<b>KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN</b>	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
38.	<b>KECAMATAN HARAU</b>	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota
39.	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
	Camat Situjuah Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Anggota
40.	KECAMATAN AKABILURU	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
41.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
42.	<b>KECAMATAN KAPUR IX</b>	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 20 Desember 2022

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**